

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum Berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu Pengeluaran. Pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak wajib pajak yang salah penyetoran, misalnya Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB) maka wajib pajak yang mempunyai NPWP perlu diberikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan perlu diberi himbauan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dimaksud bertujuan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT Tahunan ini disusun untuk memberikan pedoman yang baik

kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan PPH. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPH tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Perbaikan administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan, maka dari itu penulis memilih judul “TINJAUAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang, bahwa masih banyak yang belum mengerti prosedur penyampaian dan pengisian SPT Tahunan. Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan dengan tema Laporan Praktek Kerja yang akan di bahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung?

2. Bagaimana pengolahan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung?

1.3 Tujuan Praktek Kerja (Magang)

Praktek kerja (magang) ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui dan menambah pengetahuan tentang prosedur penyampaian SPT di KPP.Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Memperoleh data untuk menyusun laporan magang.
3. Memperoleh pengalaman secara langsung, meningkatkan keterampilan sesuai dengan bidangnya di dunia kerja.
4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma III di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

1.4 Manfaat

Manfaat dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, kegiatan ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan kerja.
2. Bagi pembaca, hasil kegiatan ini diharapkan dapat menambah informasi dan dapat mengetahui prosedur penyampaian SPT Tahunan di KPP.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat menjadi informasi dalam prosedur penyampaian SPT Tahunan dan dalam melakukan pengolahan SPT Tahunan.